

BAHAN AJAR
PENYULUHAN PERTANIAN (PETERNAKAN)

Oleh:

Syahirul Alim



LABORATORIUM SOSIOLOGI DAN PENYULUHAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbī, penulis panjatkannya karena dengan Rahmat-Nya , akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan diktat/bahan ajar untuk mata kuliah penyuluhan peternakan. Bahan ajar ini berisi tentang pengertian pokok penyuluhan, falsafah dan prinsip penyuluhan, penggunaan metode penyuluhan dan proses adopsi inovasi.

Bahan ajar penyuluhan ini dibuat dengan harapan agar mahasiswa dapat memiliki pengertian yang luas dan mendalam tentang penyuluhan tidak sekedar mendapatkannya dari kuliah saja. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami inti dari penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak harus mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif dan akhirnya psikomotorik. Tentang hal ini, diakui bahwa, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Hal inilah yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa penyuluhan merupakan sebuah proses yang harus kontinu dan berkesinambungan seperti halnya pendidikan.

Akhir kata mudah-mudahan bahan ajar ini bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Amiin.

Jatinangor, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

BAB

Halaman

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
I PENDAHULUAN.....		1
II PENGERTIAN PENYULUHAN.....		2
1.1. Penyuluhan Sebagai Proses Penyebar-Luasan Informasi		3
1.2. Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan		5
1.3. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku		6
1.4. Penyuluhan Sebagai Proses Belajar/Proses Belajar		7
1.5. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial		8
1.6. Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa Sosial		9
1.7. Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat		10
1.8. Penyuluhan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas		11
1.9. Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi Pembangunan		12
1.10. Redefinisi Penyuluhan Pertanian		12
III FALSAFAH PENYULUHAN.....		14
IV PRINSIP PENYULUHAN.....		19

V	ETIKA PENYULUHAN.....	25
VI	METODE PENYULUHAN.....	27
4.1.	Metode Berdasarkan teknik komunikasi	27
4.2.	Metode berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi	28
4.3.	Metode berdasarkan indera penerima	29
4.4.	Metode Penyuluhan yang Efektif dan Efisien	30
		ii
VII	PROSES ADOPSI INOVASI.....	30
	DAFTAR PUSTAKA	36

PENYULUHAN PERTANIAN (PETERNAKAN)

I Pendahuluan

Banyak pihak menilai bahwa penyuluhan pertanian mempunyai andil yang sangat besar dalam keberhasilan pembangunan pertanian dan peternakan di Indonesia. Bimbingan masal atau yang dikenal bimas dengan metode latihan dan kunjungannya telah berhasil mendifusikan suatu inovasi sehingga transfer pengetahuan dan teknologi dapat terjadi secara kontinu dan faktanya adalah Indonesia mencapai swasembada beras untuk pertamakalinya.

Penyuluhan pada dasarnya adalah pendidikan dimana target/sasarannya yaitu para petani/peternak harus mengalami perubahan perilaku, dari mulai aspek yang bersifat kognitif, afektif dan akhirnya psikomotorik. Tentang hal ini, diakui bahwa, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Sebaliknya, meskipun perubahan perilaku melalui pemaksaan dapat lebih cepat dan mudah dilakukan, tetapi perubahan perilaku tersebut akan segera hilang, manakala faktor pemaksanya sudah dihentikan. Oleh karena itu penyuluhan merupakan investasi untuk masa depan. Hasil dari penyuluhan tidak dapat diketahui dalam waktu yang singkat terlebih lagi jika tujuan utama suatu program penyuluhan adalah terjadinya adopsi suatu inovasi yang ditawarkan atau terjadinya perubahan perilaku sasaran, tentu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Kegiatan penyuluhan banyak melibatkan pertimbangan nilai. Tidak jarang penyuluh dihadapkan pada keharusan memberi informasi tidak saja demi kepentingan petani sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakatnya secara keseluruhan. Dengan demikian, dari penyuluh diinginkan kemampuannya untuk dapat mendorong

petani belajar sekaligus melakukan perubahan perilaku sasaran tanpa mengabaikan falsafah, etika dan prinsip penyuluhan. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya tujuan penyuluhan itu sendiri.

II Pengertian penyuluhan pertanian

Terminologi penyuluhan (extension), pertama kali dikenal pada pertengahan abad 19 oleh universitas Oxford dan Cambridge pada sekitar tahun 1850 (Swanson, 1997). Dalam perjalanannya van den Ban (1985) mencatat beberapa istilah seperti di Belanda disebut voorlichting yang berarti obor yang berfungsi untuk menerangi, di Jerman lebih dikenal sebagai “advisory work” (beratung), vulgarization (Perancis), dan capacitacion (Spanyol). Rding (1988) mengemukakan bahwa Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat top-down. Karena itu, dia kemudian menawarkan beragam istilah pengganti extension seperti: animation, mobilization, conscientisation. Di Malaysia, digunakan istilah perkembangan sebagai terjemahan dari extension, dan di Indonesia menggunakan istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari voorlichting (Adjid, 2001).

Diskusi tentang penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Pemicunya adalah, karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan karena penggunaan istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan yang sebenarnya “tidak memahami” esensi makna yang terkandung dalam istilah penyuluhan itu sendiri. Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peran penyuluhan semakin menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan.

Rahmat Pambudi, pada awal 1996 mulai melontarkan pentingnya istilah pengganti penyuluhan, dan untuk itu dia menawarkan penggunaan istilah transfer teknologi sebagaimana yang digunakan oleh Lionberger dan Gwin (1982). Pada tahun 1998, Mardikanto menawarkan penggunaan istilah edfikasi, yang merupakan akronim dari fungsi-fungsi penyuluhan yang meliputi: edukasi, diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti istilah penyuluhan, Margono Slamet pada kesempatan seminar penyuluhan pembangunan (2000) menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada dasawar 1990an. Terkait dengan hal tersebut, dalam perjalanannya, kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti:

- (1) Penyebar-luasan (informasi)
- (2) Penerangan/penjelasan
- (3) Pendidikan non-formal (luar-sekolah)
- (4) Perubahan perilaku
- (5) Rekayasa sosial
- (6) Pemasaran inovasi (teknis dan sosial)
- (7) Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan, dll)
- (8) Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
- (9) Penguatan komunitas (community strengthening)

1.1. Penyuluhan Sebagai Proses Penyebar-Luasan Informasi

Sebagai terjemahan dari kata “extension”, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini, merupakan penyebarluasan informasi tentang ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis. Implikasi dari pengertian ini adalah:

1) Sebagai agen penyebaran informasi, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi (peneliti, pusat informasi, institusi pemerintah, dll) melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi kliennya. Dalam hubungan ini, penyuluh harus mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya yang dimiliki serta segala media/ saluran informasi yang dapat digunakan (media-masa, internet, dll) agar tidak ketinggalan dan tetap dipercaya sebagai sumber informasi “baru” oleh kliennya.

2) Penyuluh harus aktif untuk menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metoda, nilai-nilai perilaku, dll. Hal ini penting, karena di samping dari penyuluh, masyarakat seringkali juga memperoleh informasi/inovasi dari sumber-sumber lain (aparatur pemerintah, produsen/ pelaku bisnis, media masa, LSM) yang tidak selalu “benar” dan bermanfaat/ menguntungkan masyarakat/kliennya. Sebab, dari pengalaman menunjukkan, informasi yang datang dari “luar” seringkali lebih berorientasi kepada “kepentingan luar” dibanding keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya.

3) Penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi dari “dalam” baik yang berupa “kearifan tradisional” maupun “endogenous technology”. Hal ini penting, karena informasi yang berasal dari dalam, di samping telah teruji oleh waktu, seringkali juga lebih sesuai dengan kondisi setempat, baik ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, sosial/budaya, maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan pengembangan komunitas setempat.

4) Pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masyarakat, di samping: inovasi teknologi, kebijakan, manajemen, dll. Hal ini penting, karena yang untuk pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali sangat tergantung kepada kemauan dan keputusan politik. Sebagai contoh, program intensifikasi padi terbukti tidak banyak memberikan perbaikan kesejahteraan petani. Demikian juga yang terjadi kaitannya dengan kebijakan impor beras, gula, daging, dll.

1.2. Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan

Penyuluhan yang berasal dari kata dasar “suluh” atau obor, eka-logis sebagai terjemahan dari kata “voorlichting” dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi yang dalam kegelapan. Sehingga, penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan (beneficiaries), sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru-penerangnya. Terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat “searah” melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi “timbang-balik” yang memusat (convergence) sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Hal ini penting, agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat “pemaksaan kehendak” (indoktrinasi, agitasi, dll) melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat kliennya secara berkelanjutan.

1.3. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku

Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya). Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada “penyebar-luasan informasi/inovasi”, dan “memberikan penerangan”, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat-tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) yang menjadi “klien” penyuluhan”.

Sebagai contoh: Pada penyuluhan penggunaan pupuk terhadap tanaman tertentu,, kegiatan penyuluhan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian penerangan atau penjelasan kepada petani, tetapi harus dilakukan terus-menerus sampai petani tersebut mau menggunakan, bahkan secara mandiri mau berswadaya untuk membeli pupuk tersebut. Implikasi dari penegertian perubahan perilaku ini adalah:

1) Harus diingat bahwa, perubahan perilaku yang diharapkan tidak hanya terbatas pada masyarakat/klien yang menjadi “sasaran utama” penyuluhan, tetapi penyuluhan harus mampu mengubah perilaku semua stakeholders pembangunan, terutama aparat pemerintah selaku pengambil keputusan, pakar, peneliti, pelaku bisnis, aktiivis LSM, tokoh masyarakat dan stakeholders pemba-ngunan yang lainnya.

2) Perubahan perilaku yang terjadi, tidak terbatas atau berhenti setelah masyarakat/klien mengadopsi (menerima, menerapkan, mengikuti) informasi/inovasi yang disampaikan, tetapi juga ter-masuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan terhadap inovasi yang sudah diyakininya, manakala ada informasi/inovasi/kebijakan baru yang lebih bermanfaat bagi perbaikan kesejahteraannya.

3) Dari contoh penyuluhan pemupukan di atas, kegiatan penyuluhan tidak berhenti sampai pada tumbuhnya swadaya masyarakat untuk menggunakan dan membeli pupuk, tetapi juga kesiapannya untuk menerima “pupuk baru” sebagai pengganti pupuk yang disuluhkan itu.

4) Perubahan perilaku yang dimaksudkan tidak terbatas pada kesediaannya untuk menerapkan/menggunakan inovasi yang ditawarkan, tetapi yang lebih penting dari kesemuanya itu adalah kesediaannya untuk terus belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan (life long education).

1.4. Penyuluhan Sebagai Proses Belajar/Proses Belajar

Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti: pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun social-ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman).

Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubahan-perubahannya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru akan meluntur kembali, manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keunggulan “baru” yang diyakininya memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan/hadiah atau pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan/hadiah/pemaksaan tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatannya.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, dalam konsep “akademik” dapat mudah dimaklumi, tetapi dalam praktek kegiatan, perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebab pendidikan yang dimaksud di sini tidak berlangsung vertikal yang lebih bersifat “menggurui” tetapi merupakan pendidikan orang-dewasa yang berlangsung horizontal dan lateral yang lebih bersifat “partisipatif”. Dalam kaitan ini, keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadaran (sikap), pengetahuan, dan ketrampilan “baru” yang mampu mengubah perilaku kelompok-sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih menyejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyarakatnya. Jadi, pendidikan dalam penyuluhan adalah proses belajar bersama.

1.5. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial

SDC (1995) menyatakan bahwa, penyuluhan tidak sekadar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka

panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memper-baiki kehidupan masyarakatnya .

Yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti: demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, dll.

1.6. Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (social engineering) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Karena kegiatan rekayasa-sosial dilakukan oleh "pihak luar", maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak-luar (perekayasa). Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi tidak dapat sepenuhnya dapat diterima. Sebab, rekayasa-sosial yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok-sasarannya, seringkali dapat berakibat negatif, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyarakat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.

Sebagai contoh: Upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan memang diperlukan, tetapi jika dalam proses untuk berpartisipasi tersebut masyarakat dituntut lesediannya untuk banyak berkorban termasuk mengorbankan hak-hak normatifnya sebagai warga negara (harus tunduk, tidak boleh membantah, dll) maka proses rekayasa sosial seperti itu bukanlah perubahan-sosial sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki oleh kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan Sebagai Proses Pemasaran Sosial (Social Marketing).

Yang dimaksud dengan “pemasaran sosial” adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Berbeda dengan rekayasa-sosial yang lebih berkonotasi untuk “membentuk” (to do to) atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang “baru” sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa, proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk “menawarkan” (to do for) sesuatu kepada masyarakat. Jika dalam rekayasa-sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan perekayasa, pengambilan keputusandalam pemasaran-sosial sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Termasuk dalam pengertian “menawarkan” di sini adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan hakiki di sini adalah, masyarakat berhak menawar bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat, akan merugikan, atau membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban dan atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diterimanya.

1.7. Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut

diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (capacity strengthening) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain (penyuluh, LSM, dll)

1.8. Penyuluhan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas (Capacity Strengthening)

Yang dimaksud dengan penguatan kapasitas di sini, adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diartikan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih berhasilguna (efektif) dan berdayaguna (efisien) secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini, kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Penguatan masyarakat disini, memiliki makna-ganda yang bersifat timbal-balik. Di satu pihak, penguatan diarahkan untuk lebih mampukan individu agar lebih mampu ber-peran di dalam kelompok dan masyarakat global, di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global. Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat

dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat global (UNDP, 1998)

1.9. Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi Pembangunan

Sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987). Di dalam pengertian “menumbuh-kembangkan”, terkandung upaya-upaya untuk:

- 1) Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela, bukan karena paksaan atau ancaman-ancaman
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis dan non-ekonomis)
- 3) Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Sedang yang dimaksud dengan “partisipasi” tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk berkorban, tetapi berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, sejak: pengambilan keputusan tentang penting-nya pembangunan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1.10. Redefinisi Penyuluhan Pertanian

Dalam kepustakaan yang selama ini dapat dijumpai, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian diartikan sebagai pendidikan luarsekolah yang ditujukan kepada petani dan keluarganya agar dapat bertani lebih baik, berusaha yang lebih menguntungkan, demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan

masyarakatnya (Wiriadmadja, 1976; Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, 1981; Mardikanto, 1993)

Pemahaman tersebut tidak seluruhnya salah, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan kehidupan masyarakat global dan tuntutan pembangunan pertanian, baik yang menyangkut konteks dan kontennya, oleh Saragih (2002) dinilai penting untuk melakukan “redefinisi” yang menyangkut pengertian “penyuluhan pertanian” Perubahan-perubahan tersebut telah melanda semua “stakeholder” pembangunan pertanian, yang membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap perubahan perilaku masing-masing (Gambar 4). Meskipun demikian, dalam UU No 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah:

Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terhadap berbagai pengertian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu:

- a) Penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan/pengembangan masyarakat dalam arti luas.
- b) Dalam praktek, pendidikan selalu dikonotasikan sebagai kegiatan pengajaran yang bersifat “menggurui” yang membedakan status antara guru/pendidik yang selalu “lebih pintar” dengan murid/ peserta didik yang harus menerima apa saja yang diajarkan oleh guru/pendidiknya

c) Pemangku kepentingan (stakeholders) agribisnis tidak terbatas hanya petani dan keluarganya.

d) Penyuluhan pertanian bukanlah kegiatan karitatif (bantuan cuma-cuma atas dasar belas-kasihan) yang menciptakan ~~rgak~~ ~~tt~~ ~~egan~~

e) Pembangunan pertanian harus selalu dapat memperbaiki produktivitas, pendapatan dan kehidupan petani secara berkelanjutan.

Telaahan beragam pengertian yang terkandung dalam istilah “penyuluhan” sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan pemahaman bahwa penyuluhan dapat diartikan sebagai:

proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

III Falsafah Penyuluhan Pertanian

Kata falsafah memiliki pengertian yang beragam. Butt (1961) mengartikan falsafah sebagai suatu pandangan hidup. Dahama dan Bhatnagar (1980) mengartikan falsafah sebagainya landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan di dalam praktek.

Dalam khasanah kepustakaan penyuluhan pertanian, banyak kita jumpai beragam falsafah penyuluhan pertanian. Berkaitan dengan itu, Ensminger (1962) mencatat adanya 11 (sebelas) rumusan tentang falsafah penyuluhan. Di Amerika

Serikat juga telah lama dikembangkan falsafah 3-T: *Teach, Truth, And Trust* (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan). Artinya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi (baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Rumusan lain yang lebih tua dan nampaknya paling banyak dikemukakan oleh banyak pihak dalam banyak kesempatan adalah, yang dikutip Kelsey dan Hearne (1955) yang menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa: falsafah penyuluhan adalah: bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*). Supadi (2006) memberikan catatan bahwa dalam budaya feodalistik, pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang "lebih tinggi" dibanding yang dibantu. Pemahaman seperti itu, sangat kontradiktif dengan teori pendidikan kritis untuk pembebasan. Oleh karena itu, pemahaman konsep "membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri" harus dipahami secara demokratis yang menempatkan kedua-belah pihak dalam kedudukan yang setara. Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa:

- 1) Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicondro, 1990). Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.

2) Penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk ber-swakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sarannya.

3) Penyuluhan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Berkaitan dengan falsafah “helping people to help themselves” Ellerman (2001) mencatat adanya 8 (delapan) peneliti yang menelusuri teori pemberian bantuan, yaitu:

1) Hubungan Penasehat dan Aparat Birokrasi Pemerintah (Albert Hirschman), melalui proses pembelajaran tentang: ide-ide baru, analisis keadaan dan masalahnya yang diikuti dengan tawaran solusi dan minimalisasi konfrontasi/ketegangan yang terjadi: antara aparat pemerintah dan masyarakat, antar sesama aparat, dan antar kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan yang menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah.

2) Hubungan Guru dan Murid (John Dewey), dengan memberikan:

- a) kesempatan untuk mengenali pengalamannya,
- b) stimulus untuk berpikir dan menemukan masalahnya sendiri,
- c) memberikan kesempatan untuk melakukan “penelitian”
- d) tawaran solusi untuk dipelajari
- e) kesempatan untuk menguji idenya dengan aplikasi langsung

3) Hubungan Manajer dan Karyawan (Douglas McGregor), melalui pemberian tanggungjawab sebagai alat kontrol diri (self control)

4) Hubungan Dokter dan Pasien (Carl Rogers), melalui pemberian saran yang konstruktif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan atau diusahakannya sendiri.

Uji-coba kegiatan melalui pemberian dana dan manajemen dari luar, ternyata tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.

5) Hubungan Guru Spiritual dan Murid (Soren Kierkegaard), melalui pemahaman bahwa masalah atau kesalahan hanya dapat diketahui oleh yang mengalaminya (diri sendiri).

Guru tidak boleh menonjolkan kelebihannya, tetapi harus merendahkan diri, siap melayani, dan menyediakan waktu dengan sabar

6) Hubungan Organisator dan Masyarakat (Saul Alinsky), melalui upaya demokratisasi, menumbuh-kembangkan partisipasi, dan mengembangkan keyakinan (rasa percaya diri) untuk memecahkan masalahnya sendiri.

7) Hubungan Pendidik dan Masyarakat (Paulo Freire), melalui proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut dirinya sendiri.

8) Hubungan Agen-pembangunan dan Lembaga Lokal (E.F. Schumacher), melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang (masyarakat) dan membantu agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Mengacu kepada pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses pendidikan, di Indonesia dikenal adanya falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi:

1) Ing ngarso sung tulodo, mampu memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat-sasarannya; 2) Ing madyo mangun karso, mampu menumbuhkan inisiatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba; 3) Tut wuri handayani mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang /meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan hidupnya.

Masih bertolak dari pemahaman penyuluhan merupakan salah satu sistem pendidikan, Mudjiyo (1989) mengingatkan untuk mengaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealisme, realisme dan pragmatisme, yang berarti bahwa penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis. Di samping itu, penyuluhan pertanian harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapang atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Meskipun demikian, penyuluhan harus melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan, dan bukannya mengajar kondisi terbaik yang sulit direalisasikan.

Lebih lanjut, karena penyuluhan pada dasarnya harus merupakan bagian integral dan sekaligus sarana pelancar atau bahkan penentu kegiatan pembangunan, Slamet (1989) menekankan perlunya 1) perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat “regulatif sentralistis” menjadi “fasilitatif partisipatif”, dan 2) pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai “local agricultural practices”.

Pemahaman seperti itu, mengandung pengertian bahwa:

1) Administrasi penyuluhan tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari “pusat” yang kaku, karena hal ini seringkali menja-dikan petani tidak memperoleh keleluasaan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan administrasi yang terlalu “sentralistis” seringkali tidak mampu secara cepat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah-daerah, karena masih menunggu petunjuk atau estu dari pusat. Di pihak lain dalam setiap permasalahan yang dihadapi, peng-ambilan keputusan yang dilakukan oleh petani seringkali ber-dasarkan pertimbangan bagaimana untuk dapat “menyelamatkan keluarganya”. Dalam kasuskasus seperti itu, seharusnya penyuluh diberi kewenangan untuk secepatnya pula mengambil inisiatifnya sendiri. Karena itu, administrasi yang terlalu “regulatif” seringkali sangat membatasi kemerdekaan petani untuk mengambil keputusan bagi usahatannya.

2) Penyuluh, selain memberikan “ilmu”nya kepada petani, ia harus mau belajar tentang “ngelmu”nya petani yang seringkali dianggap tidak rasional (karena yang oleh penyuluh dianggap rasional adalah yang sudah menjadi petunjuk pusat). Padahal, praktek-praktek usahatani yang berkembang dari budaya lokal seringkali juga sangat rasional, karena telah mengalami proses “trial and error” dan teruji oleh waktu.

IV Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pertanian

Mathews menyatakan bahwa: prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan

sebagai landas-an pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans(1961) menilai bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyuluhan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator penyuluhan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) Mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan ketrampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- 2) Akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Sebab, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ penyuluhan dimasa-masa mendatang.
- 3) Asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan / peristiwa yang lainnya, misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang mencakup:

- 1) Minat dan Kebutuhan, artinya, penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenyui sesuai dengan terse-dianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuk organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- 3) Keragaman budaya, artinya, penyuluhan harus memperha-tikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam. Di lain pihak, perencanaan penyuluhan yang seragam untuk seti-ap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dll.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.

6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda penyuluhan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarnya.

7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pangalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata. Penggunaan metoda yang sesuai, artinya penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosialbudaya) sasarnya. Dengan kata lain, tidak satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien.

9) Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/ kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan penyuluhannya.

10) Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-

kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).

11) Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:

- a) Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga,
- b) Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan,
- c) Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama
- d) Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga
- e) Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usahatani,
- f) Penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda,
- g) Penyuluhan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluar-ga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya
- h) Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakat-nya.

12) Kepuasan, artinya, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya.

Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis, dan di lain pihak seiring dengan terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip (Soedijanto, 2001):

1) Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh

kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.

2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung-jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.

4) Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil kegiatannya.

5) Egaliter, yang menempatkan semua stakeholder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.

6) Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders.

7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.

9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

10) Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

V Etika Penyuluhan

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah “kegiatan penyuluhan” bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi “profesi”. Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan pertanian belum sungguh-sungguh dilaksanakan secara profesional. Hal ini terlihat pada:

- 1) Kemampuan penyuluh untuk melayani kliennya yang masih terpusat pada aspek teknis budidaya pertanian, sedang aspek manajemen, pendidikan kewirausahaan, dan hak-hak politik petani relatif tidak tersentuh.
- 2) Kelambanan transfer inovasi yang dilakukan penyuluh dibanding kecepatan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pelaku bisnis, LSM, media-masa dan stakeholder yang lain.
- 3) Kebanggaan penyuluh terhadap jabatan fungsional yang disandanginya yang lebih rendah dibanding harapannya untuk memperoleh kesempatan menyandang jabatan struktural.
- 4) Kinerja penyuluh yang lebih mementingkan pengumpulan “credit point” dibanding mutu layanannya kepada masyarakat
- 5) Persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang dikemukakan oleh masyarakat petani dan stakeholder yang lain.

Kenyataan-kenyataan seperti itu, sudah lama disadari oleh masyarakat penyuluhan pertanian di Indonesia, sehingga pada Kongres Penyuluhan Pertanian ke I pada tahun 1986 disepakati untuk merumuskan “Etika Penyuluhan” yang seharusnya dijadikan acuan perilaku penyuluh..

Pengertian tentang Etika, senantiasa merujuk kepada tata pergaulan yang khas atau ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya. Etika bukanlah peraturan, tetapi lebih dekat kepada nilai-nilai moral untuk membangkitkan kesadaran untuk beriktikad baik dan jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada tercemarnya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompok yang lainnya (Muhamad, 1987). Sehubungan dengan itu, Herman Soewardi mengingatkan bahwa penyuluh harus mampu berperilaku agar masyarakat selalu memberikan dukungan yang tulus ikhlas terhadap kepentingan nasional.

Tentang hal ini, Padmanegara (1987) mengemukakan beberapa perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh (pertanian), yang meliputi:

- 1) Perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, dan disiplin.
- 2) Perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau menghormati adat/kebiasaan masyarakatnya, menghormati petani dan keluarganya (apapun keadaan dan status sosial ekonominya), dan menghormati sesama penyuluh.
- 3) Perilaku yang menunjukkan penampilannya sebagai penyuluh yang andal, yaitu: berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, memiliki tanggungjawab yang besar untuk

melaksanakan pekerjaannya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan berkemampuan untuk bekerja teratur.

4) Perilaku yang mencerminkan dinamika, yaitu ulet, daya mental dan semangat kerja yang tinggi, selalu berusaha mencerdaskan diri, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuannya

Proses belajar bersama dalam penyuluhan, sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai kegiatan belajar secara insidental untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penumbuhan dan pengembangan semangat belajar seumur hidup (*long life learning*) secara mandiri dan berkelanjutan.

VI. Metode Penyuluhan

Terdapat berbagai macam metode penyuluhan pertanian. Untuk membandingkan berbagai metode tersebut bisa dilakukan berdasarkan teknik komunikasi, jumlah sasaran dan indera penerima sasaran (Wiriadmadja, 1990).

4.1. Metode Berdasarkan teknik komunikasi

Berdasarkan teknik komunikasi metode penyuluhan dapat dibedakan antara yang langsung (*muka ke muka/ face to face communication*) dan yang tidak langsung (*indirect communication*). Metode yang langsung digunakan pada waktu penyuluhan pertanian/peternakan berhadapan muka dengan sasarannya sehingga memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat (Mardikanto, 1993). Misalnya pembicaraan di balai desa, di sawah, dalam kursus, demonstrasi dan sebagainya. Metode yang langsung ini dianggap lebih efektif, meyakinkan dan mengakrabkan hubungan antara penyuluh dan sasaran serta cepatnya respon atau umpan balik dari sasaran (Martangara, 1993). Dalam

kondisi terbatasnya personalia, kurangnya sarana transportasi, terbatasnya biaya dan waktu maka metode ini kurang efisien.

Metode yang tidak langsung digunakan oleh penyuluhan pertanian/peternakan yang tidak langsung berhadapan dengan sasaran, tetapi menyampaikan pesannya melalui perantara (medium atau media). Contohnya adalah media cetak (majalah, koran), media elektronik (radio, televisi), media pertunjukan atau sandiwara, pameran dan lain-lain. Metode tidak langsung ini dapat menolong banyak sekali apabila metode langsung tidak memungkinkan digunakan. Terutama dalam upaya menarik perhatian dan menggugah hati sasaran. Siaran lewat radio dan televisi dapat menarik banyak perhatian, bila ditangani secara tepat. Pameran yang baik diselenggarakannya akan baik memberikan kesan yang lama dan meyakinkan. Demikian pula halnya dengan pertunjukan film atau slides yang sekaligus dapat memberikan hiburan dan pengetahuan umum kepada masyarakat di pedesaan. Namun metode penyuluhan tak langsung tidak memungkinkan penyuluh mendapatkan respon dari sasaran dalam waktu relatif singkat (Mardikanto, 1993)

4.2. Metode berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi

Berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi maka penyuluhan dibedakan menjadi hubungan perseorangan, hubungan kelompok dan hubungan massal. Metode dengan hubungan perseorangan digunakan penyuluhan pertanian/peternakan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masing-masing orangnya. Misalnya adalah kunjungan ke rumah, ke sawah, ke kantor, pengiriman surat kepada perseorangan dan hubungan telepon. Dalam banyak hal, hubungan perseorangan diperlukan agar petani menerapkan rekomendasi yang dianjurkan.

Metode dengan hubungan kelompok digunakan oleh penyuluhan pertanian/peternakan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok. Metode ini sesuai dengan keadaan dan norma sosial dari masyarakat pedesaan Indonesia, seperti

hidup berkelompok, bergotong-royong dan berjiwa musyawarah (Rasida, 1991 ; Martanegara, 1993). Contohnya adalah pertemuan, demonstrasi, karya wisata, pameran, perlombaan, kursus, diskusi kelompok dan lain-lain. Metode ini dapat meningkatkan tahapan minat dan perhatian ke tahapan evaluasi dan mencoba menerapkan rekomendasi yang dianjurkan.

Metode dengan hubungan masal digunakan oleh penyuluhan pertanian/peternakan untuk menyampaikan pesan langsung atau tidak langsung kepada banyak orang sekaligus pada waktu yang hampir bersamaan. Contohnya adalah pidato dalam pertemuan besar, siaran pedesaan lewat radio dan televisi, pertunjukan wayang atau dagelan, penyebaran bahan cetakan, penempelan poster, pembentangan spanduk dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk menarik minat dan perhatian masyarakat akan sesuatu rekomendasi usaha tani-ternak.

4.3. Metode berdasarkan indera penerima

Berdasarkan indera penerima pada sasaran metode penyuluhan dapat digolongkan menjadi metode yang dapat dilihat, metode yang dapat didengar serta metode yang dapat dilihat dan didengar. Dalam metode yang dapat dilihat, pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan. Contohnya adalah metode publikasi barang cetakan, gambar, poster, leaflet dan lain-lain. Pertunjukan film bisu dan slide tanpa penjelasan lisan, pameran tanpa penjelasan lisan, surat-menyurat dan sebagainya. Dalam metode yang dapat didengar pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera pendengaran. Contohnya siaran lewat radio dan tape recorder, hubungan melalui telepon, pidato ceramah dan lain-lain. Sedangkan metode yang dapat dilihat dan didengar pesan penyuluhannya diterima oleh sasaran melalui indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Contohnya adalah metode pertunjukan film bersuara, siaran lewat televisi, wayang, kursus berupa pelajaran dikelas dan prakteknya, karya wisata, pameran dengan penjelasan lisan.

4.4. Metode Penyuluhan yang Efektif dan Efisien

Suatu metode disebut efektif apabila dengan metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penyuluhan, tujuan yang diinginkan tercapai (Martanegara, 1993). Dalam ini metode penyuluhan dikatakan efektif apabila tercapainya tahap penerapan (*adoption*) dalam proses adopsi. Unsur-unsur dari keefektifan metode penyuluhan adalah (Martanegara, 1993) :

1. tingkat kemampuan penyuluh, yaitu pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam memberikan informasi penyuluhan.
2. keadaan alat bantu penyuluhan yaitu ketersediaan alat bantu pada saat penyuluhan.
3. kesesuaian waktu dan tempat penyuluhan yaitu kesesuaian dan ketepatan waktu pertemuan dan tempat pelaksanaannya.
4. materi penyuluhan, yaitu ketepatan dan kesesuaian materi penyuluhan dengan masalah yang dihadapi.
5. kondisi dan tingkat adopsi peternak.
6. kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu kejelasan dan kesesuaian tujuan penyuluhan dengan kepentingan-kepentingan sasaran.

Sedangkan efisien berarti hemat, dalam arti menggunakan semua sumber daya (tenga, waktu, pikiran dan biaya) sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar-besar (tujuan penyuluhan tercapai). Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penyuluhan tidak menghabiskan banyak biaya, waktu, tenaga dan pikiran.

VII. PROSES ADOPSI INOVASI

Proses adopsi inovasi merupakan proses kejiwaan/mental yang terjadi pada diri petani pada saat menghadapi suatu inovasi, dimana terjadi proses penerapan suatu ide baru

sejak diketahui atau didengar sampai diterapkannya ide baru tersebut. Pada proses adopsi akan terjadi perubahan-perubahan dalam perilaku sasaran umumnya akan menentukan suatu jarak waktu tertentu. Cepat lambatnya proses adopsi akan bergantung dari sifat dinamika sasaran.

Rogers dan Shoemaker (1971) adopsi adalah proses mental, dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Sedangkan Feder dkk (1981) adopsi didefinisikan sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Di lain pihak Samsudin (1994) menyatakan bahwa adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari suatu pihak, disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat sebagai pihak kedua. Selanjutnya menurut Mardikanto (1993) adopsi dalam penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima "inovasi" yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya. Penerimaan disini mengandung arti tidak sekedar "tahu" tetapi dengan benar-benar dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan benar serta menghayatinya. Penerimaan inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain sebagai cerminan dari adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Sehubungan dengan itu Rogers dan Shoemaker 1971 (dalam Deptan 2001) mengemukakan lima tahap proses adopsi yaitu: (1) Awareness (tahu dan sadar), pertama kali mendapat suatu ide dan praktek baru, (2) Interest (minat), mencari rintisan informasi, (3) Evaluation (evaluasi), menilai manfaat inovasi yaitu penilaian tentang untung ruginya sesuatu inovasi bila ia melaksanakannya (dapatkah saya mengerjakannya), (4) Trial (mencoba), mencoba menerapkan inovasi pada skala kecil, (5) Adoption (adopsi), menerapkan inovasi pada skala besar pada usahatani.

Lima tahap inovasi ini bukan merupakan pola kaku yang pasti diikuti oleh petani, tetapi sekedar menunjukkan adanya lima urutan yang sering ditemukan oleh peneliti maupun petani. Peneliti menunjukkan perlunya waktu yang lama antara saat pertama kali petani mendengar suatu inovasi dengan saat melakukan adopsi. Pengklasifikasian kelompok pengadopsi

Ciri-ciri yang membedakan setiap kelompok mengadopsi diringkas sebagai berikut:

1. Pembaharu (innovator)

- Lahan usaha tani luas, pendapatan tinggi
- Status sosial tinggi
- Aktif di masyarakat
- Banyak berhubungan dengan orang secara formal dan informal
- Mencari informasi langsung ke lembaga penelitian dan penyuluh pertanian
- Tidak disebut sebagai sumber informasi oleh petani lainnya

2. Pengadopsi Awal (Early Adopter)

- Usia lebih muda
- Pendidikan lebih tinggi
- Lebih aktif berpartisipasi di masyarakat
- Lebih banyak berhubungan dengan penyuluh pertanian
- Lebih banyak menggunakan surat kabar, majalah dan buletin

3. Mayoritas Awal (Early Majority)

- Sedikit di atas rata-rata dalam umur, pendidikan dan pengalaman petani
- Sedikit lebih tinggi dalam status sosial
- Lebih banyak menggunakan surat, majalah dan buletin
- Lebih sering menghadiri pertemuan pertanian
- Lebih awal dan lebih banyak mengadopsi daripada mayoritas lambat.

4. Mayoritas Lambat (Late Majority)

- Pendidikan kurang
- Lebih tua
- Kurang aktif berpartisipasi di masyarakat
- Kurang berhubungan dengan penyuluhan pertanian
- Kurang banyak menggunakan surat kabar, majalah, buletin.

5. Kelompok Lamban (Laggard)

- Pendidikan kurang
- Lebih tua
- Kurang aktif berpartisipasi di masyarakat
- Kurang berhubungan dengan penyuluhan
- Kurang banyak menggunakan surat kabar, majalah, buletin.

Untuk lebih jelasnya pengklasifikasian kelompok adopsi dapat dilihat pada Gambar Tahu Minat Evaluasi Mencoba Adopsi

Dalam tahap tahu media massa seperti radio, televisi, surat kabar dan bulletin paling banyak digunakan. Peringkat berikutnya adalah teman dan tetangga, terutama petani sejawat, menyusul penyuluh pertanian dan pedagang. Dalam tahap minat memerlukan informasi yang rinci mengenai inovasi. Media masa atau petani lain merupakan sumber informasi yang paling banyak

disebut, selanjutnya penyuluh pertanian dan pedagang. Dalam tahap evaluasi petani harus menilai manfaat inovasi maupun kecocokannya dengan keadaan setempat. Patani sejawat yang berpengalaman merupakan sumber informasi peringkat pertama. Selanjutnya penyuluh pertanian,

pedagang dan media massa. Dalam tahap mencoba petani memerlukan informasi mengenai penggunaan inovasi. Teman dan tetangga merupakan sumber informasi peringkat pertama, selanjutnya penyuluh pertanian, pedagang dan media masa.

Dalam tahap adopsi pengalaman pribadi dan petani sejawat merupakan factor yang paling penting dalam penggunaan inovasi yang berkesinambungan. Penyuluh pertanian dan media massa dianggap penting manakala memperkuat keputusan yang diambil atau memberikan informasi yang memperlancar keberhasilan. Inovasi adalah segala sesuatu ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seorang sebagai sesuatu yang baru. Havelock 1973 (dalam Nasution, 1990) menyatakan bahwa inovasi merupakan segala perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya Seseorang menganggap baru, tetapi belum tentu ide yang sama itu baru bagi orang lain. Mardikanto (1993) mengemukakan bahwa inovasi adalah suatu ide, perilaku, produk, informasi, dan pratek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan/diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang mendorong terjadi perubahan-perubahan disegala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu/warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut Samsudin (1994) inovasi adalah sesuatu yang baru yang disampaikan kepada masyarakat lebih baik dan lebih menguntungkan dari hal-hal sebelumnya. Selain itu Depari (1995) menyatakan bahwa inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Adopsi Inovasi Dan FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Suparlan (1986) menyatakan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh (a) tidak bertentangan dengan pola kebudayaan yang telah ada, (b) struktur sosial masyarakat dan pranata sosial, dan (c) persepsi masyarakat terhadap inovasi. Menurut Deptan (2001), bahwa kecepatan proses adopsi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi. Dilain pihak Liongberger dan Gwin (1982) mengelompokkan faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi antara lain, variable

internal (personal), variabel eksternal (situasional) dan variabel kelembagaan (pendukung).

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, Dudung Abdul. 2001. *Membangun Pertanian Modern* Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta.
- _____. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Yayasan Pengembangan Sinar Tani. Jakarta.
- Campbell, A. Dunstan and St. Clair Barker . 1997. *Selecting Appropriate Content And Methods In Programme Delivery*. Food and Agriculture Organization. Rome.
- Hornby, A. S. dan Parnwell. 1972. *Learner's Dictionary*. Indira. Jakarta.
- Kartasapoetra, A. G. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lionberger, H. F. 1961. *Adoption of New Ideas and Practices*. The Iowa State University Press. Iowa.
- Lionberger dan Paul Gwin. 1982. *Communication strategies*. Illinois . the interstate printers and publisher.
- Margono, Slamet. 1978. *Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian*. IPB. Bogor.
- Mardikanto, Totok dan Sri Sutarni. 1993. *Petunjuk Penyuluhan Pertanian*. Usaha Nasional. Surabaya.
- Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Martanegara, Achmad B.D. 1993. *Hubungan Antara Keefektifan Metode Penyuluhan Dan Karakteristik Serta Sikap Peternak Terhadap Cara Pemberian Pakan Pada Sapi Perah* Laporan Penelitian. Fakultas Peternakan Unpad. Bandung.
- Mosher. A.T. 1978. *An Introduction To Agriculturd Extension*. New York Agricultural Development Council. New York.
- Rogers. 1971. *Communication of Inovation*. The Free Press. New York.
- Rosida, Dwi Agustiyah. 1991. *Analisis Tingkat Adopsi Teknologi Sapta Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat Di Kabupaten Bogor*. Tesis . Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran. Bandung.

- Soekartawi. 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. UI press. Jakarta
- Sumitro, Maskun. 1992. *Penyuluhan Pembangunan Masyarakat Di negara Sedang Berkembang : Dalam Penyuluhan Pembangunan Di Indonesia : Menyongsong Abad XXI*. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Wiriatmadja. 1977. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*. C.V. Yasaguna. Jakarta.
- _____. 1990. *Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian*. C.V. Yasaguna. Jakarta.
- Van Den Ban, A. W dan Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Jakarta.